Informasi yang disampaikan pada media ini **dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**



Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Status Nihil Menggunakan Coretax Form

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260209



Informasi pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru

Terakhir diperbaharui 09-02-2026

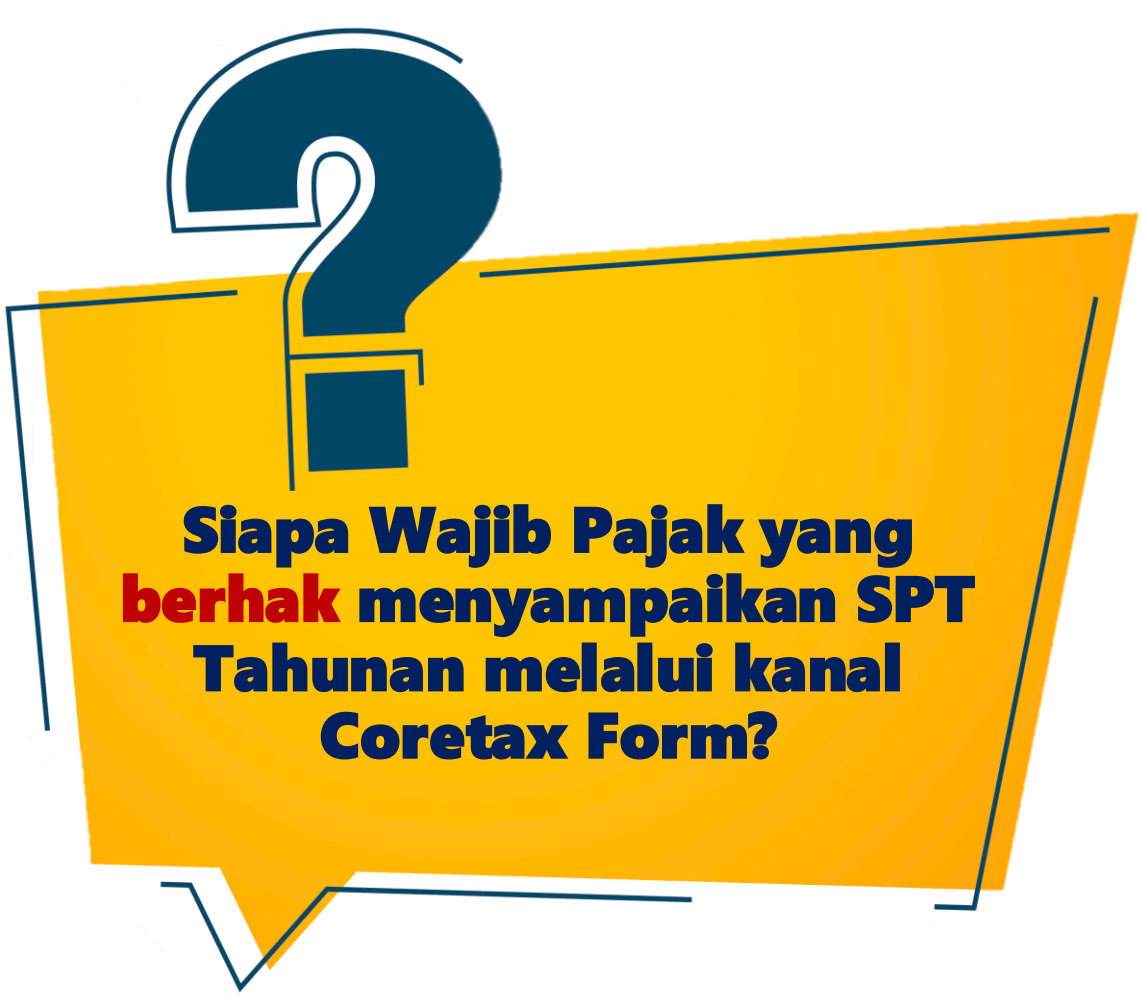
Penyusun

Adi Wiyono
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda
Direktorat P2humas

Muhammad Iqbal Rahadian Syaefudin
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama
Direktorat P2humas

Zulfikar Irfial Chizli
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama
Direktorat P2humas

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Siapa Wajib Pajak yang berhak menyampaikan SPT Tahunan melalui kanal Coretax Form?

- Wajib Pajak Orang Pribadi
- Penghasilan dapat berasal dari Pekerjaan, Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas
- SPT yang disampaikan berstatus Nihil
- Tidak menggunakan Norma dalam menghitung Penghasilan Neto

Yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT Coretax Form

- Untuk membuka dokumen formulir elektronik SPT, perlu menginstal aplikasi viewer **Adobe Acrobat Reader (Minimal Reeader DC Versi 20)**
- Jika terdapat nilai selain Rp0,- pada **PPh KURANG/LEBIH BAYAR** di bagian Induk Halaman 2 poin 11a, maka SPT Coretax Form tidak dapat disampaikan.
- Beberapa isian dalam Coretax Form sudah terisi secara prefill dari berbagai sumber data. Beberapa isian data prefill tersebut ada yang editable, namun ada juga yang non-editable. Untuk data yang non-editable maka harus diupdate terlebih dulu dari sumber datanya (contoh: identitas WP, daftar keluarga).
- Terdapat delay sinkronisasi data selama 1 hari antara data portal Coretax dengan prefill data Coretax Form. Misal pemberi kerja baru membuat bukti potong hari ini, maka data bupot nya baru akan ter-prefill ke SPT Coretax Form pihak yang dipotong besok. Begitu juga dengan BPE SPT yang telah disampaikan melalui Coretax Form baru akan masuk datanya pada Portal Coretax setelah 1 hari.

Soal Latihan (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi)

Pada kesempatan ini kita akan praktik membuat **SPT Tahunan PPh orang pribadi (status normal)** atas nama **Tuan A,** dengan batasan kondisi sesuai penjelasan bahwa **Tuan A**:

- bekerja pada **satu pemberi kerja** sebagai pegawai tetap yang bekerja selama satu tahun penuh sejak bulan Januari 2025 s.d. Desember 2025 dan telah memiliki Bukti Potong BPA1 dari Perusahaan,
- penghasilan bruto yang diterima sebesar Rp533.500.000 dan dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp82.875.000,
- Penghasilan istri dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto sebesar Rp140.000.000 dan dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp6.180.000,
- Penghasilan dari usaha UMKM dengan omzet Rp1.200.000.000 dan telah melakukan pembayaran PPh Final UMKM sebesar Rp3.500.000,
- memiliki Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) **K/3** –Kawin dengan 3 tanggungan, Tuan A melaksanakan kewajiban perpajakan suami dan istri digabung,
- memiliki **harta** s.d akhir tahun pajak 2025 berupa kas yang disimpan di Indonesia dengan tahun perolehan 2024 sebesar Rp300.000.000,- dan harta bergerak berupa mobil dengan tahun perolehan 2025 harga perolehan Rp200.000.000,-,
- memiliki **hutang** s.d. akhir tahun pajak 2025 berupa hutang dari pemberi pinjaman di Indonesia dengan tahun perolehan 2025 sebesar Rp200.000.000,-,
- tidak memiliki penghasilan lain selain dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan usaha UMKM di atas,
- tidak memiliki pembayaran zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang disampaikan kepada lembaga keagamaan yang dibuat atau disahkan oleh Pemerintah,
- tidak memiliki fasilitas pajak,
- tidak memiliki kredit pajak lain

PRAKTIK

TAHAP 1:
LOGIN & PERSIAPAN DOKUMEN PENDUKUNG

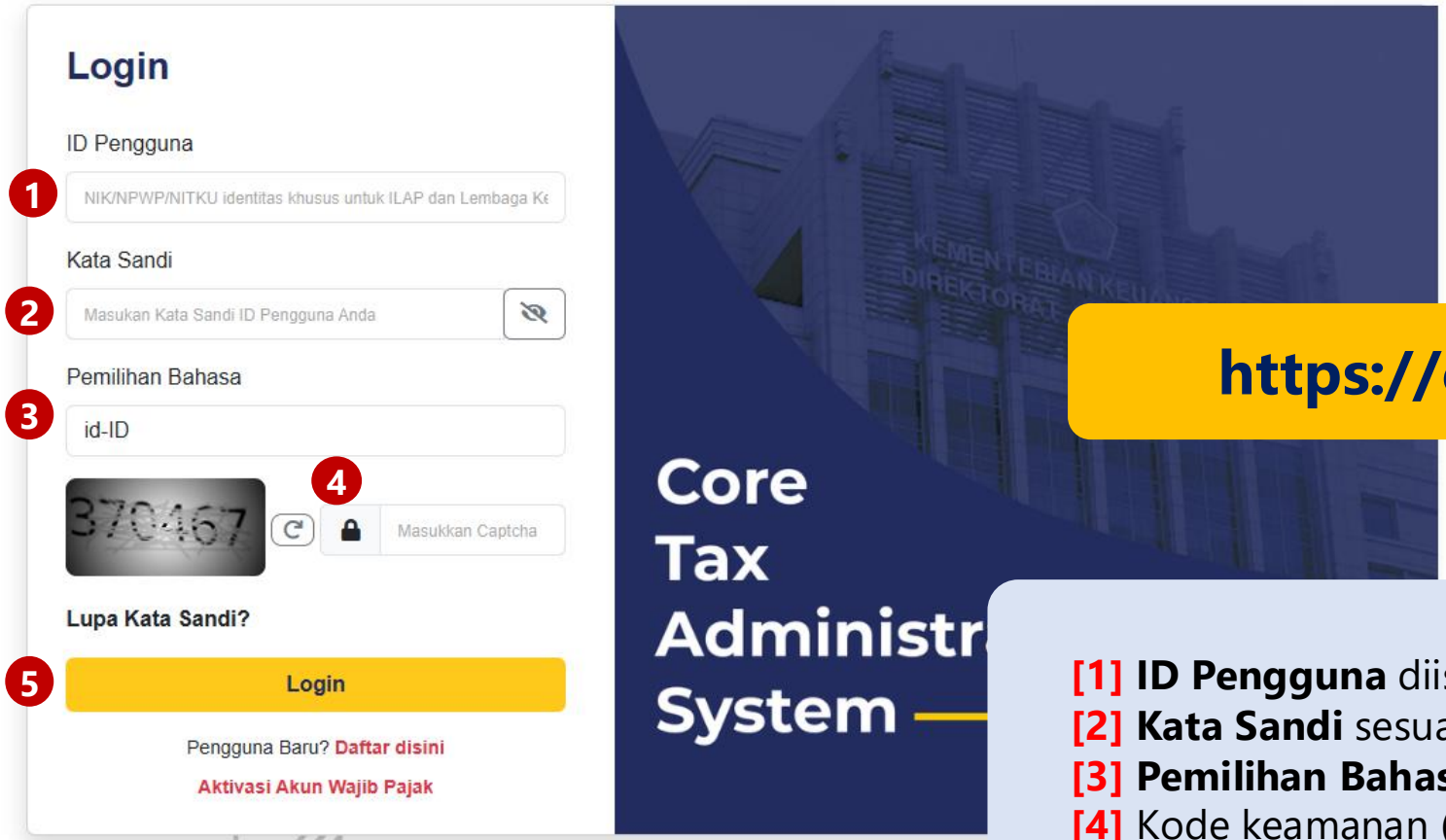
Tahap Persiapan Dok. Pendukung



Apa saja dokumen yang harus disiapkan?

- Dokumen Bukti Potong dari Pemberi Penghasilan
- Dokumen Data Tanggungan dan Anggota Keluarga
- Dokumen data Harta dan Utang
- Dokumen pendukung lain yang dibutuhkan

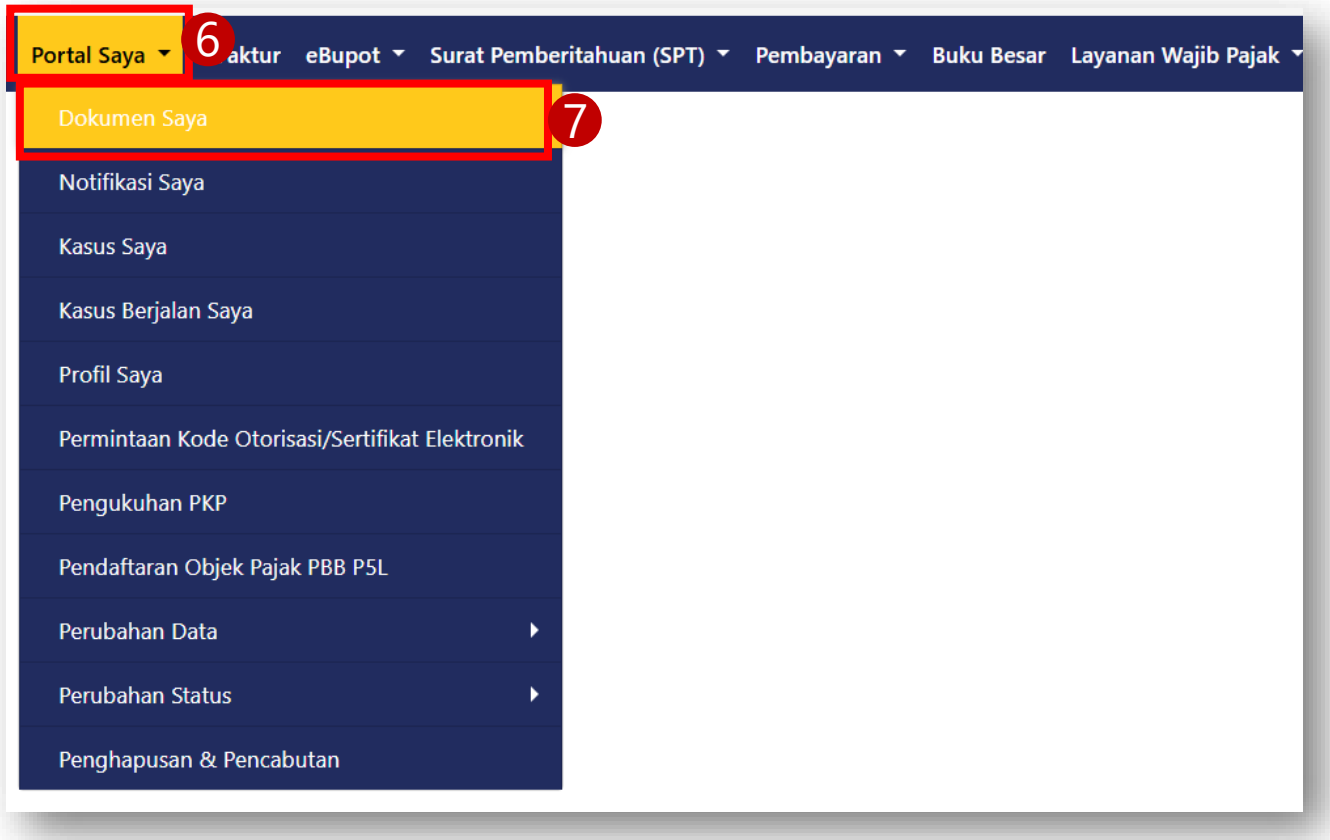
Halaman Login



https://coretaxdjp.pajak.go.id

[1] **ID Pengguna** diisi dengan **NIK/NPWP 16 digit**
[2] **Kata Sandi** sesuai dengan ***password*** **Coretax**
[3] **Pemilihan Bahasa** untuk **memilih Bahasa (en-US/ id-ID)**
[4] Kode keamanan **(Captcha)**
[5] **Login**

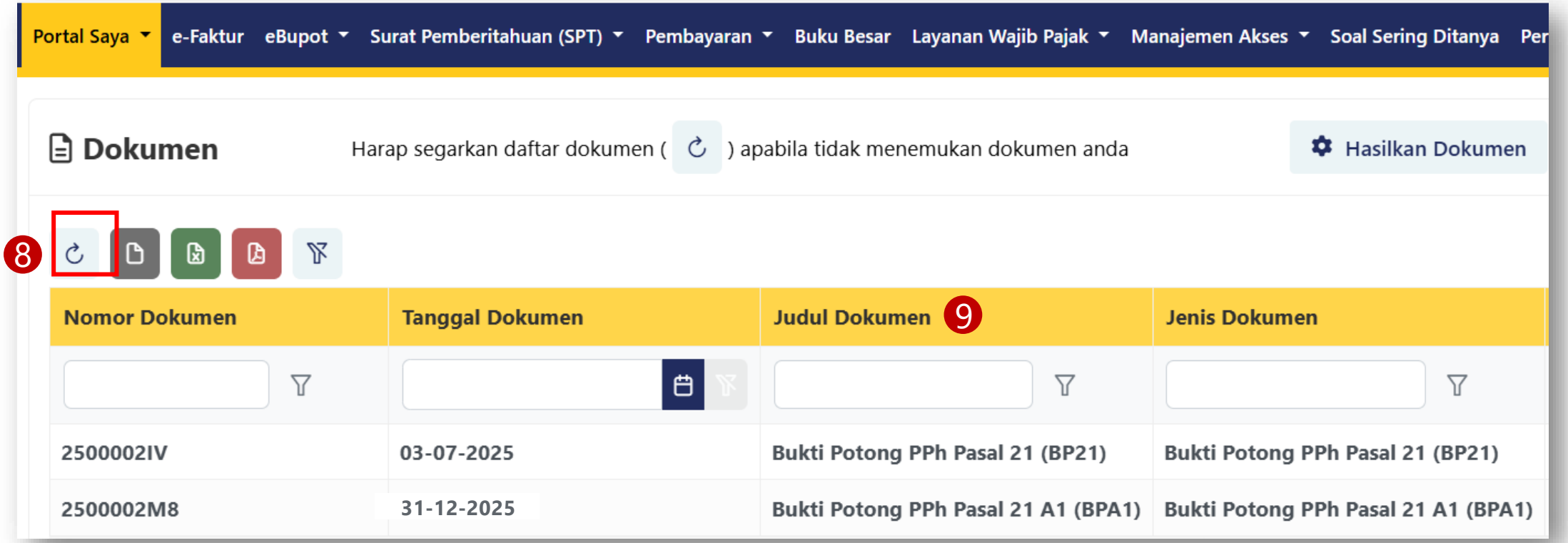
Tahap Persiapan Bukti Potong



Wajib Pajak dapat secara mandiri mengunduh dokumen Bukti Potong yang sudah diterbitkan oleh Pemotong Pajak Penghasilan pada portal Wajib Pajak

[6] Pilih **Portal Saya**
[7] Pilih **Dokumen Saya**

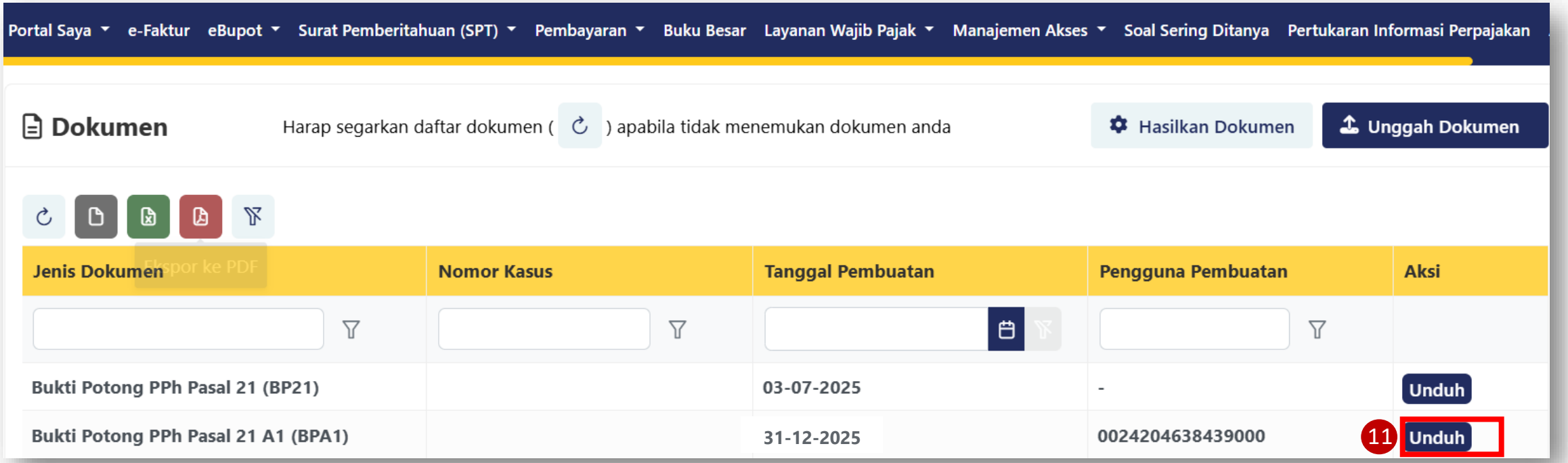
Tahap Persiapan Bukti Potong



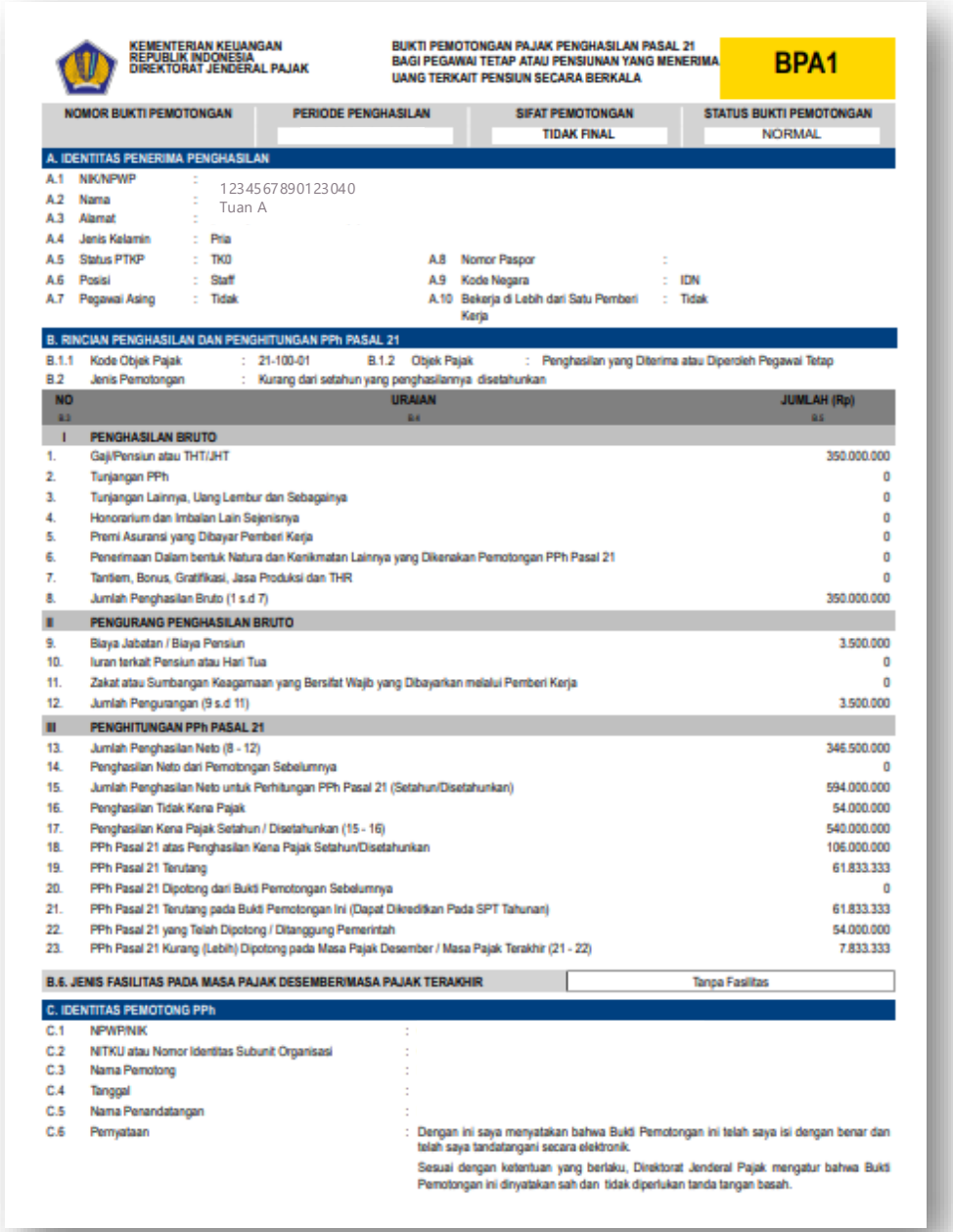
10

[8] Pilih lambang agar muncul seluruh file dokumen yang tersedia pada portal Wajib Pajak
[9] Silakan dipilih file yang akan diunduh
[10] Silakan **gulir kekanan** untuk mengunduh Dokumen Bukti Potong

Tahap Persiapan Bukti Potong



[11] Pilih **Unduh** untuk mengunduh Dokumen Bukti Potong A1 (BPA1)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA
UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

BPA1

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
		TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	: 1234567890123040			
A.2	Nama	: Tuan A			
A.3	Alamat	:			
A.4	Jenis Kelamin	: Pria			
A.5	Status PTKP	: TK0	A.8	Nomor Paspor	:
A.6	Posisi	: Staff	A.9	Kode Negara	: IDN
A.7	Pegawai Asing	: Tidak	A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	: Tidak

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1 Kode Objek Pajak : 21-100-01 B.1.2 Objek Pajak : Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap

B.2 Jenis Pemotongan : Kurang dari setahun yang penghasilannya disetahunkan

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	I PENGHASILAN BRUTO	
1.	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	350.000.000
2.	Tunjangan PPh	0
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	0
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	0
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	0
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	0
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	0
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)	350.000.000
	II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO	
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	3.500.000
10.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	0
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)	3.500.000
	III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)	346.500.000
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	594.000.000
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16)	540.000.000
18.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	106.000.000
19.	PPh Pasal 21 Terutang	61.833.333
20.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	0
21.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	61.833.333
22.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	54.000.000
23.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	7.833.333

B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR: Tanpa Fasilitas

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1	NPWP/NIK	:
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:
C.3	Nama Pemotong	:
C.4	Tanggal	:
C.5	Nama Penandatangan	:
C.6	Pernyataan	: Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.

Berikut ini adalah contoh tampilan Bukti Potong A1 (BPA1)

*Nilai yang tertera pada Bukti Potong hanya ilustrasi

PRAKTIK

TAHAP 2: PEMBUATAN KONSEP SPT

Tahap Pembuatan Konsep SPT



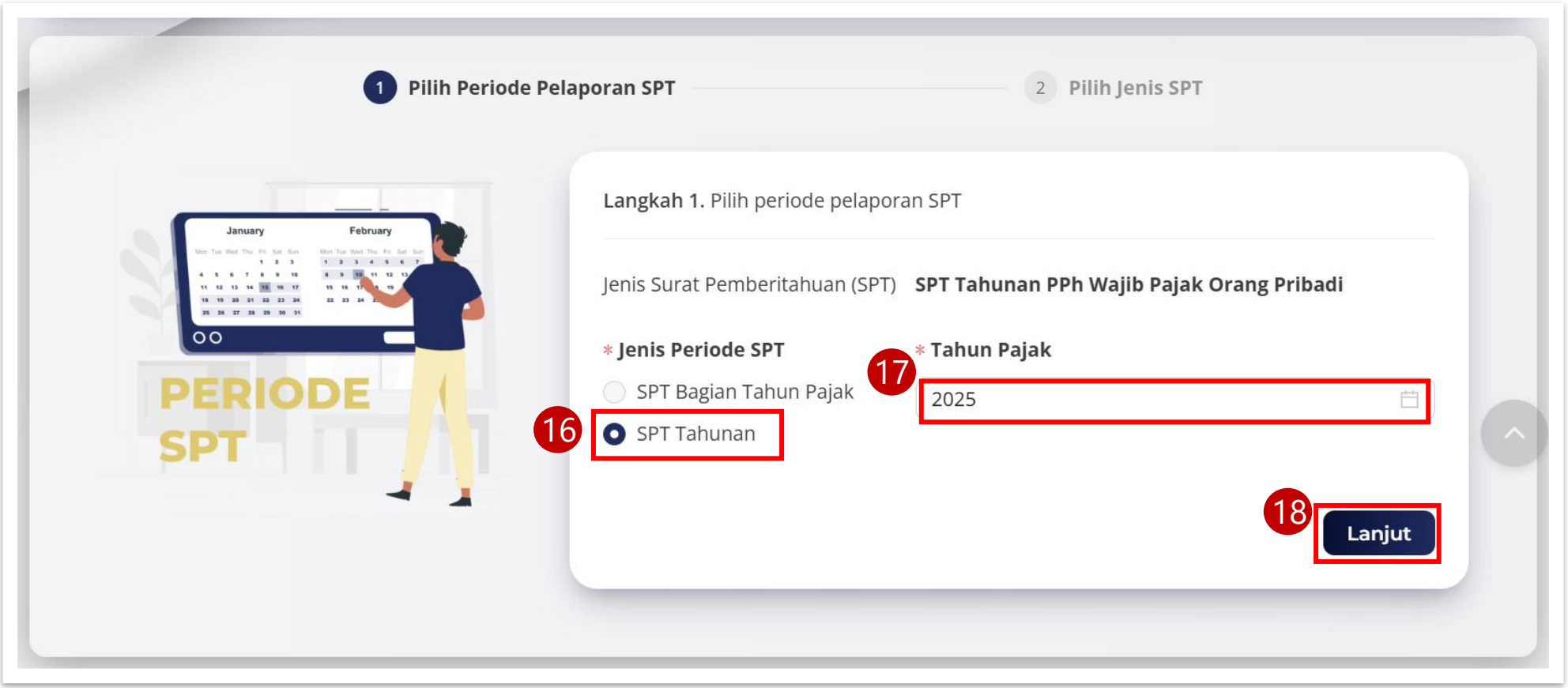
[12] Pilih modul **Surat Pemberitahuan (SPT)**
[13] Pilih **Coretax Form**

Tahap Pembuatan Konsep SPT



[14] Pastikan sudah di menu **Konsep SPT**
[15] Pilih **Buat Konsep SPT**

Tahap Pembuatan Konsep SPT



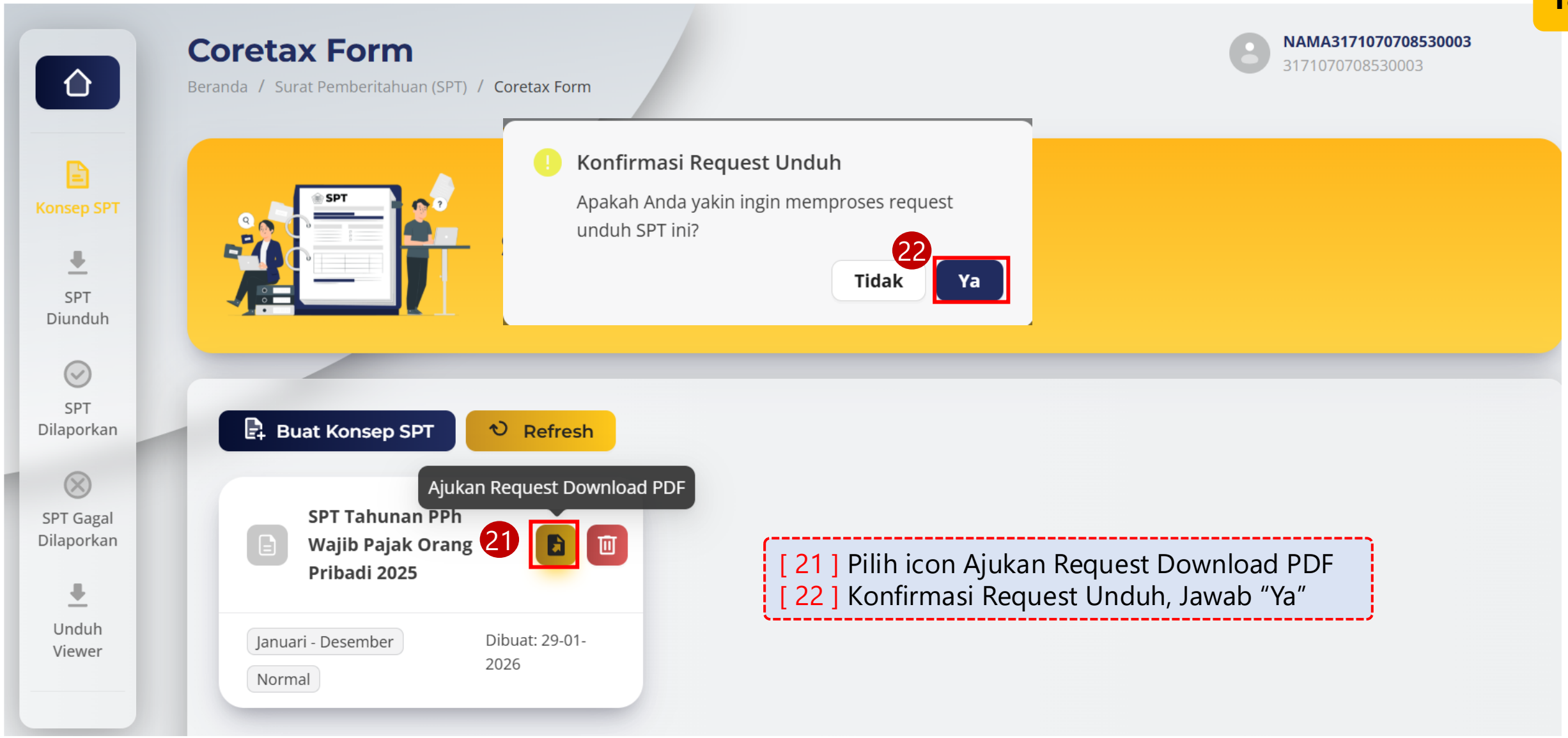
[16] Pilih Jenis Periode SPT **SPT Tahunan**
[17] Pilih Tahun Pajak **2025**
[18] Pilih **Lanjut**

Tahap Pembuatan Konsep SPT



[19] Pilih Model SPT **Normal**
[20] Pilih Buat Konsep

Tahap Pembuatan Konsep SPT

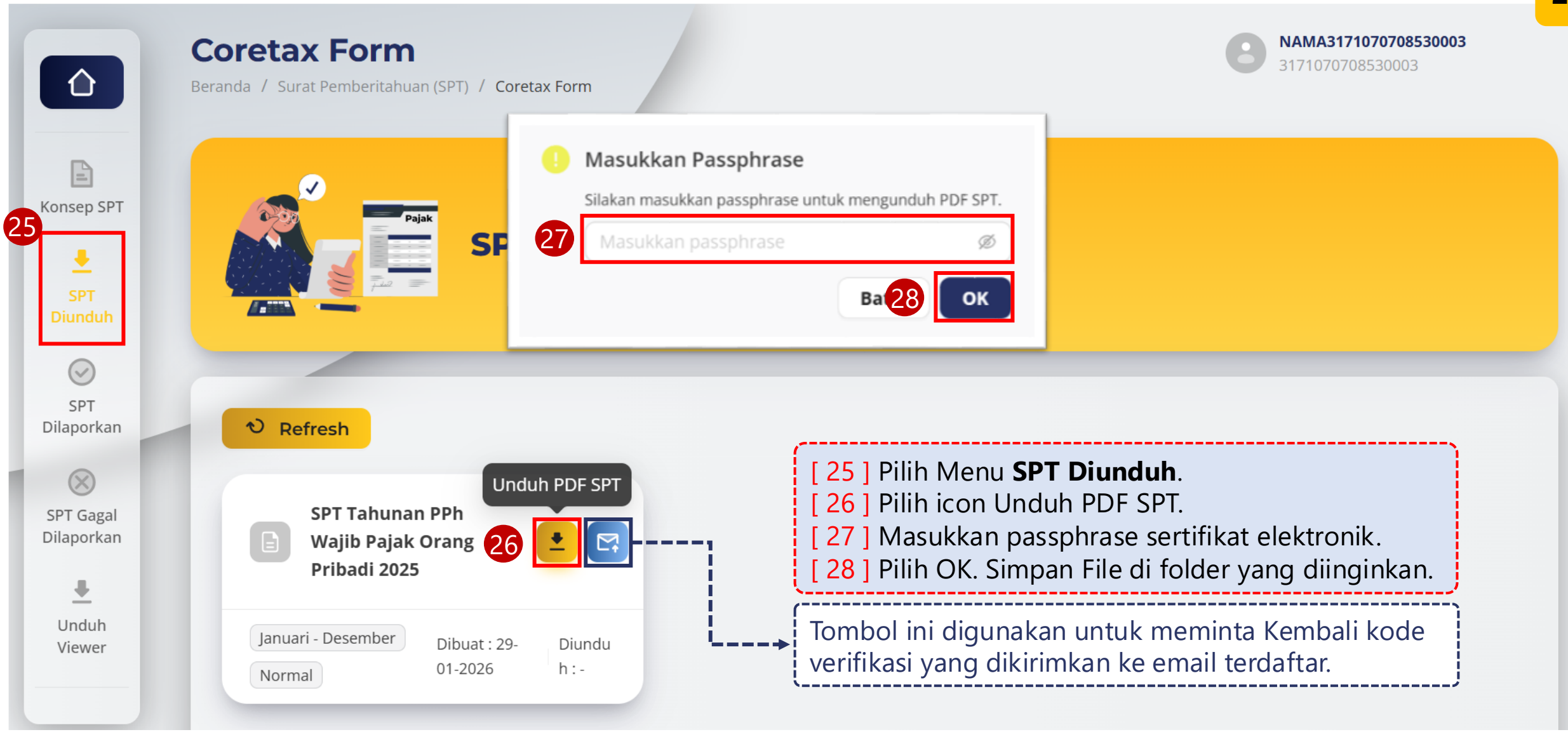


[21] Pilih icon Ajukan Request Download PDF
[22] Konfirmasi Request Unduh, Jawab “Ya”

Tahap Pembuatan Konsep SPT



Tahap Pembuatan Konsep SPT



[25] Pilih Menu **SPT Diunduh**.
[26] Pilih icon Unduh PDF SPT.
[27] Masukkan passphrase sertifikat elektronik.
[28] Pilih OK. Simpan File di folder yang diinginkan.

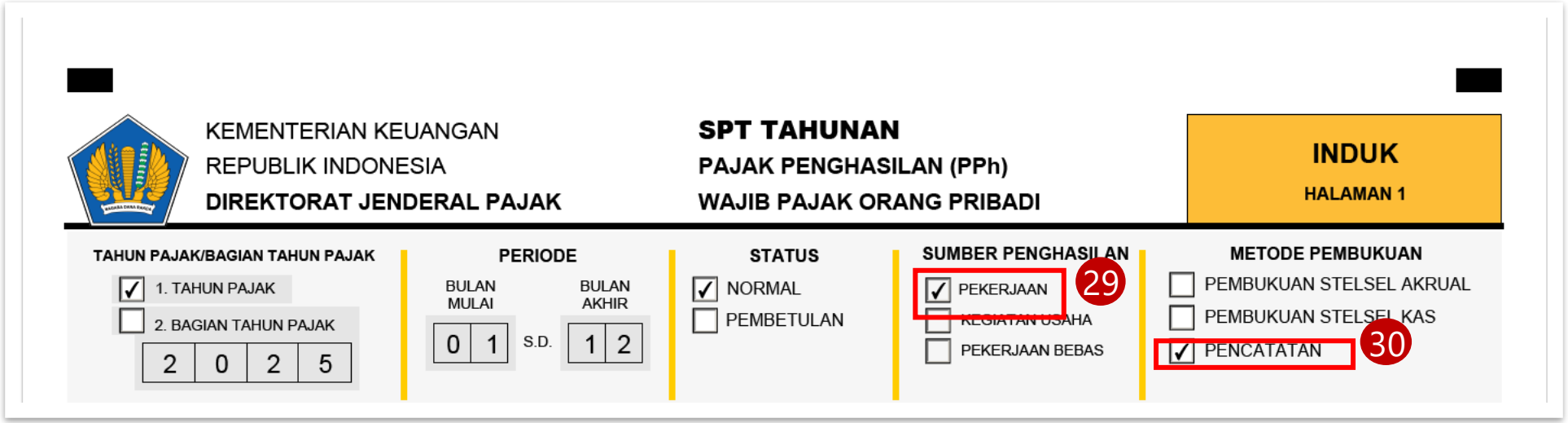
Tombol ini digunakan untuk meminta Kembali kode verifikasi yang dikirimkan ke email terdaftar.

PRAKTIK

TAHAP 3: PENGISIAN INDUK SPT

BAGIAN A s.d. BAGIAN J

Induk SPT



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK
☑ 1. TAHUN PAJAK
☐ 2. BAGIAN TAHUN PAJAK
2025

PERIODE
BULAN MULAI: 01 S.D. BULAN AKHIR: 12

STATUS
☑ NORMAL
☐ PEMBETULAN

SUMBER PENGHASILAN
☑ PEKERJAAN 29
☐ KEGIATAN USAHA
☐ PEKERJAAN BEBAS

METODE PEMBUKUAN
☐ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL
☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS
☑ PENCATATAN 30

[29] Bagi WP OP karyawan seperti pegawai swasta, PNS, Anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, silakan pilih Sumber Penghasilan "**Pekerjaan**"
[30] Pilih Metode Pembukuan "**Pencatatan**"

- Pada bagian Header, isian Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, Periode Pembukuan, dan Status SPT akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai isian pada tahap sebelumnya

A. Identitas WP

- Identitas Wajib Pajak akan terisi secara otomatis oleh sistem baik NIK/NPWP, Nama, Jenis ID, Nomor ID, Nomor Telepon dan Email berdasarkan profil wajib pajak
- Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri diisi jika Wajib Pajak menjalankan Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT) **untuk kasus ini dikosongkan**
- NIK/NPWP Suami/Istri akan terisi otomatis dalam hal status perpajakan suami dan istri Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT), **karena pada kasus ini dicontohkan kewajiban perpajakan suami dan istri digabung, maka kolom ini tidak terisi**



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK: [x] 1. TAHUN PAJAK [ ] 2. BAGIAN TAHUN PAJAK — 2025
PERIODE: BULAN MULAI 01 S.D. BULAN AKHIR 12
STATUS: [x] NORMAL [ ] PEMBETULAN
SUMBER PENGHASILAN: [x] PEKERJAAN [ ] KEGIATAN USAHA [ ] PEKERJAAN BEBAS

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP	3171070708530003
2. NAMA	NAMA3171070708530003
3. JENIS ID	[x] KTP [ ] KITAS [ ] PASSPORT
4. NO.ID	3171070708530003
5. NO.TELEPON	08987852735
6. EMAIL	saptaka.adhi@gmail.com

7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI: Silahkan Pilih

(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH atau MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)

NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

B. Ikhtisar Penghasilan Neto



B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1 a APAKAH ANDA MERNERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN? — 527.500.000

31 ☐ Tidak. (lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☑ Ya. (Isi **Lampiran 1 Bagian D** lalu ke pertanyaan selanjutnya) — Lampiran 1 Bagian D

b 1) APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS?

32 ☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)
☑ Ya. (Lanjut ke Pertanyaan selanjutnya)

2) APAKAH ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)?

☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
33 ☑ Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi **Lampiran 3B Bagian A**, lalu ke pertanyaan selanjutnya) — Lampiran 3B Bagian A
☐ Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi **Lampiran 3B Bagian B**, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3) APAKAH ANDA MENGGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?

☐ Tidak, saya menyelanggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
34 ☑ Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan 1c)
☐ Ya, saya berhak menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto. (Isi **Lampiran 3B Bagian C**, **Lampiran 3A-4 Bagian A**, lalu lanjut ke pertanyaan 1c)

4) ANDA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN, SEBUTKAN SEKTOR USAHA YANG ANDA LAKUKAN.

☐ Dagang. (Isi **Lampiran 3A-1**, lalu ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Jasa. (Isi **Lampiran 3A-2**, lalu ke pertaanyaan selanjutnya)
☐ Industri. (Isi **Lampiran 3A-3**, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

5) PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS — 0

c APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA?

35 ☑ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya. (Isi **Lampiran 3A-4 Bagian B**, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

d APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?

36 ☑ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya. (Isi **Lampiran 2 Bagian C**, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

[31] Pilih **Ya**
[32] Pilih **Ya**
[33] Pilih **Ya (urutan 2)**
[34] Pilih **Tidak (urutan 2)**
[35] Pilih **Tidak**
[36] Pilih **Tidak**

Bagian Induk akan menentukan Lampiran yang akan muncul pada SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, mohon diperhatikan untuk setiap pengisian jawaban atas pertanyaan yang muncul

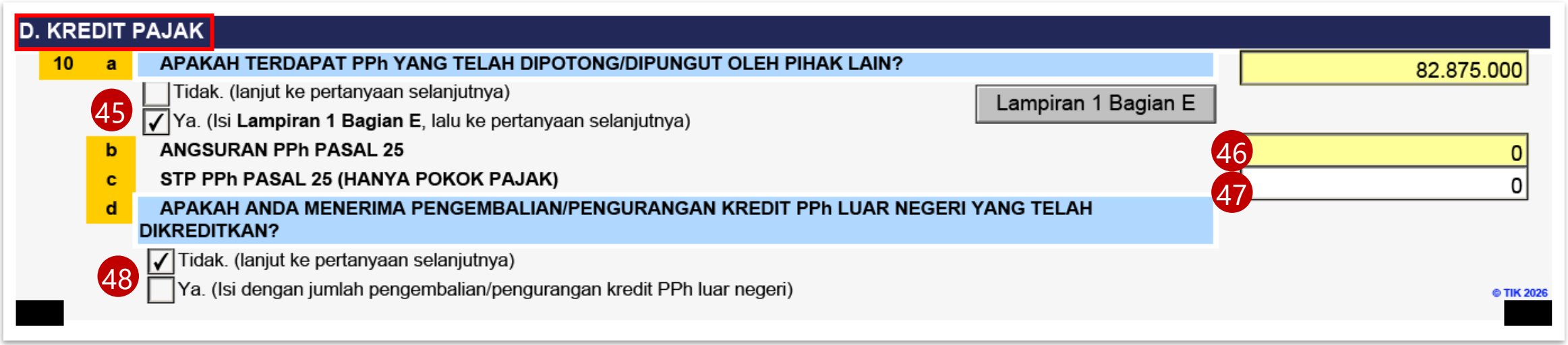
C. Perhitungan Pajak Terutang

C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

2	PENGHASILAN NETO SETAHUN	(1a + 1b + 1c + 1d)	37	527.500.000
3	APAKAH TERDAPAT PENGURANGAN PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?			
	38 ☑ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)			
	☐ Ya. (Isi **Lampiran 5 Bagian A** dan/atau **Bagian B**, lalu ke pertanyaan selanjutnya)			
4	PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO	(2 - 3)	39	527.500.000
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	40 K/3	41	72.000.000
6	PENGHASILAN KENA PAJAK	(4 - 5)	42	455.500.000
7	PPh TERUTANG			82.875.000
8	APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG?			
	43 ☑ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)			
	☐ Ya. (Isi **Lampiran 5 Bagian C**, lalu ke pertanyaan selanjutnya)			
9	PPh TERUTANG SETELAH PENGURANGAN PPh TERUTANG	(7 - 8)	44	82.875.000

[37] Penghasilan neto setahun akan **terisi oleh sistem**
[38] Pilih **Tidak**
[39] Penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto akan **terisi oleh sistem**
[40] Pilih PTKP yang sesuai, untuk kasus ini pilih **K/3**
[41] Penghasilan Kena Pajak akan **terisi oleh sistem**
[42] PPh terutang akan **terisi oleh sistem**
[43] Pilih **Tidak**
[44] PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang akan **terisi oleh sistem**

D. Kredit Pajak



D. KREDIT PAJAK

10	a	APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?	82.875.000
		☐ Tidak. (lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 45 ☑ Ya. (Isi **Lampiran 1 Bagian E**, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	Lampiran 1 Bagian E
	b	ANGSURAN PPh PASAL 25	46 0
	c	STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	47 0
	d	APAKAH ANDA MENERIMA PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PPh LUAR NEGERI YANG TELAH DIKREDITKAN?	
		48 ☑ Tidak. (lanjut ke pertanyaan selanjutnya) ☐ Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri)	

© TIK 2026

[45] Pilih **Ya**
[46] Untuk kasus ini tidak ada prefill data
[47] Untuk kasus ini tidak diisi
[48] Pilih **Tidak**

E. PPh Kurang/Lebih Bayar

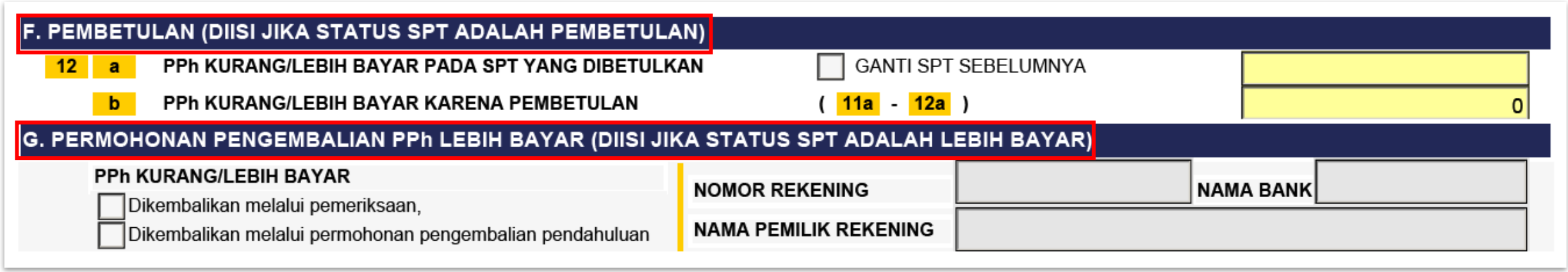


E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11	a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR	(9 - 10a - 10b - 10c + 10d)	49	0
	b	APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK			
		50 ☑ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)			
		☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)			
	c	PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR	(11a - 11b)	51	0

[49] Akan terisi oleh sistem
[50] Akan terisi oleh sistem sesuai dengan data pada Coretax
[51] Akan terisi oleh sistem

F. Pembetulan & G. Permohonan Pengembalian



F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12	a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN	☐ GANTI SPT SEBELUMNYA	
	b	PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN	(11a - 12a)	0

G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh KURANG/LEBIH BAYAR

☐ Dikembalikan melalui pemeriksaan,

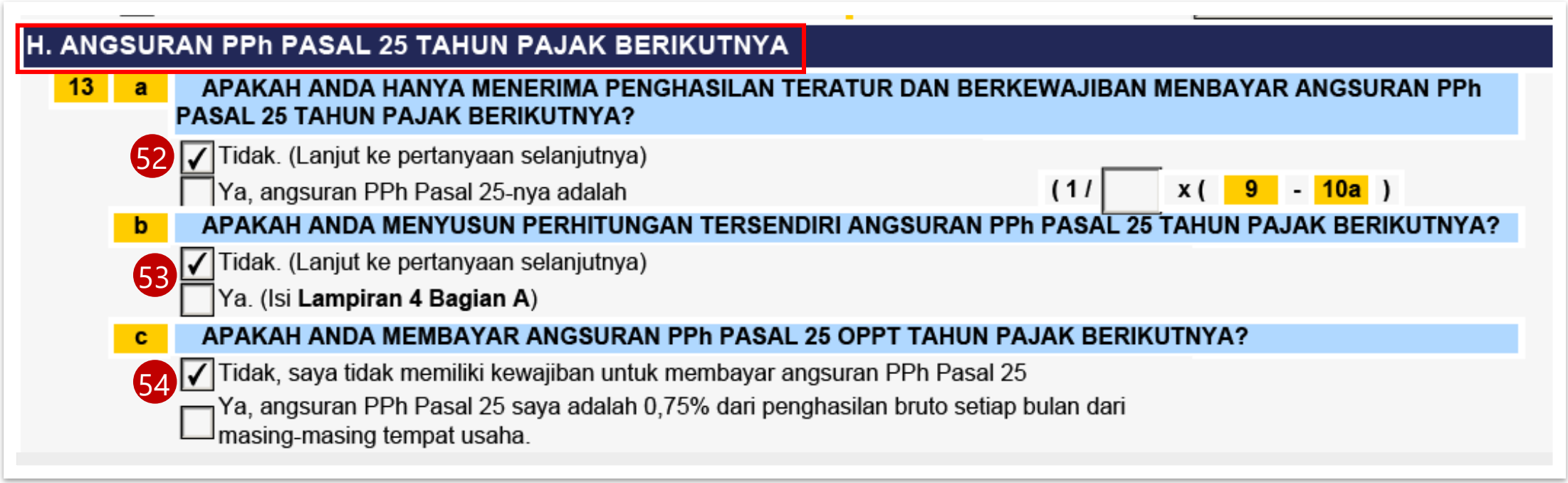
☐ Dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan

NOMOR REKENING | **NAMA BANK**

NAMA PEMILIK REKENING

- ❑ Induk Bagian F akan terisi jika status SPT Tahunan Wajib Pajak Kurang/Lebih Bayar
- ❑ Induk Bagian G dilengkapi jika status SPT Tahunan Wajib Pajak Lebih Bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar ke DJP
- ❑ **Sesuai dengan contoh kasus maka bagian ini silakan dilewati**

H. Angsuran PPh Pasal 25



H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13 a APAKAH ANDA HANYA MENERIMA PENGHASILAN TERATUR DAN BERKEWAJIBAN MENBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?

52 ☑ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

☐ Ya, angsuran PPh Pasal 25-nya adalah (1 / [ ] x (9 - 10a)

b APAKAH ANDA MENYUSUN PERHITUNGAN TERSENDIRI ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?

53 ☑ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

☐ Ya. (Isi **Lampiran 4 Bagian A**)

c APAKAH ANDA MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 OPPT TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?

54 ☑ Tidak, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25

☐ Ya, angsuran PPh Pasal 25 saya adalah 0,75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

[52] Pilih **Tidak**
[53] Pilih **Tidak**
[54] Pilih **Tidak**

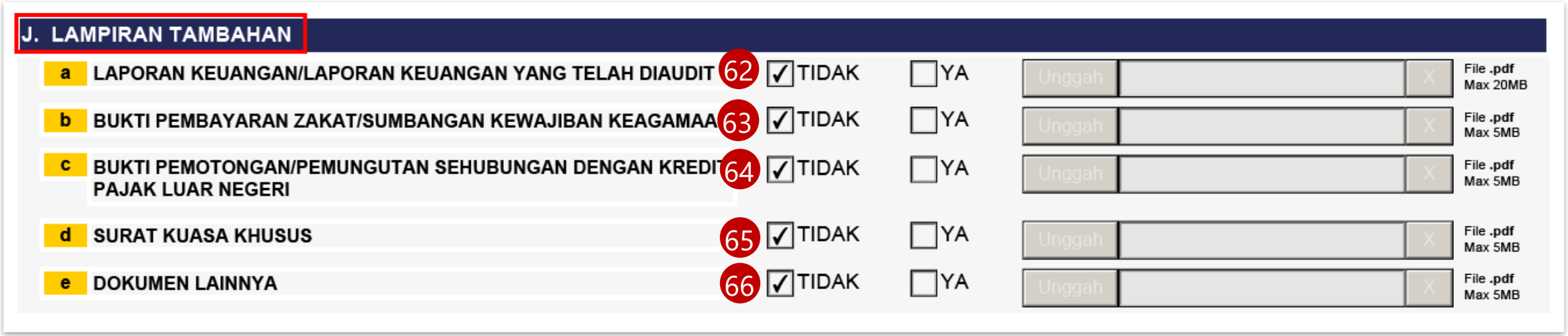
I. Pernyataan Transaksi Lain

I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14	a	HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK (Isi Lampiran 1 Bagian A)	Lampiran 1 Bagian A	500.000.000
	b	APAKAH ANDA MEMILIKI UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK?		200.000.000
55		☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan berikutnya) ☑ Ya. (Isi **Lampiran 1 Bagian B**, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	Lampiran 1 Bagian B	
	c	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?		140.000.000
56		☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan berikutnya) ☑ Ya. (Isi **Lampiran 2 Bagian A**, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	Lampiran 2 Bagian A	
	d	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?		
57		☑ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan berikutnya) ☐ Ya. (Isi **Lampiran 2 Bagian B**, lalu ke pertanyaan selanjutnya		
	e	APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FISKAL?		
58		☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan berikutnya) ☐ Ya. (Isi **Lampiran 3C**, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		
	f	APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA *ENTERTAIMENT*, BIAYA PROMOSI, PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN, SERTA PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH?		
59		☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan berikutnya) ☐ Ya. (Isi **Lampiran 3D**, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		
	g	APAKAH ANDA MENERIMA DIVIDEN DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DARI LUAR NEGERI DAN MELAPORKANNYA SEBAGAI PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?		
60		☑ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan berikutnya) ☐ Ya. (Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah)		
	h	KELEBIHAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIMINTA PENGEMBALIAN		0
61				

[55] Pilih **Ya**
[56] Pilih **Tidak**
[57] Pilih **Tidak**
[58] Terisi oleh sistem
[59] Terisi oleh sistem
[60] Pilih **Tidak**
[61] Terisi oleh sistem

J. Lampiran Tambahan



J. LAMPIRAN TAMBAHAN					
a	LAPORAN KEUANGAN/LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT	62	☑ TIDAK	☐ YA	Unggah … X — File .pdf Max 20MB
b	BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT/SUMBANGAN KEWAJIBAN KEAGAMAA	63	☑ TIDAK	☐ YA	Unggah … X — File .pdf Max 5MB
c	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN SEHUBUNGAN DENGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	64	☑ TIDAK	☐ YA	Unggah … X — File .pdf Max 5MB
d	SURAT KUASA KHUSUS	65	☑ TIDAK	☐ YA	Unggah … X — File .pdf Max 5MB
e	DOKUMEN LAINNYA	66	☑ TIDAK	☐ YA	Unggah … X — File .pdf Max 5MB

[62 s.d. 66] Pilih **No**

PRAKTIK

TAHAP 4: PENGISIAN LAMPIRAN

LAMPIRAN-1

A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak

1. KAS DAN SETARA KAS

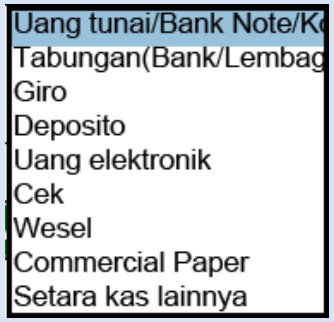
KODE	DESKRIPSI	NOMOR AKUN	ATAS NAMA	NAMA BANK/ INSTITUSI	LOKASI HARTA	TAHUN PEROLEHAN	SALDO	KETERANGAN (HARTA PPS/HARTA INVESTASI PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0101	Uang tunai/Bank Note	-	Tuan A	-	Indonesia	2024	300.000.000	
				JUMLAH TABEL 1		1	300.000.000	

2 3

1 TAMBAH HAPUS Data ke- 1

Rows 1 To 1 Of 1

[1] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan harta pada akhir tahun
[2] Pilih deskripsi kas dan setara kas



[3] Diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen kepemilikan kas dan setara kas

Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak

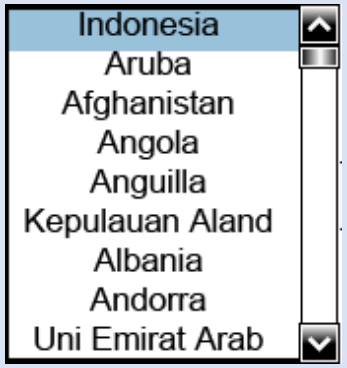
1. KAS DAN SETARA KAS

KODE	DESKRIPSI	NOMOR AKUN	ATAS NAMA	NAMA BANK/ INSTITUSI	LOKASI HARTA	TAHUN PEROLEHAN	SALDO	KETERANGAN (HARTA PPS/HARTA INVESTASI PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0101	Uang tunai/Bank Note	-	Tuan A	-	Indonesia	2024	300.000.000	
			4	5	6			
JUMLAH TABEL 1						1	300.000.000	

TAMBAH HAPUS Data ke- 1

Rows 1 To 1 Of 1

[4] Diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening
[5] Diisi dengan nama Bank atau Institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan
[6] Pilih negara tempat Kas ➔



Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak

1. KAS DAN SETARA KAS

KODE	DESKRIPSI	NOMOR AKUN	ATAS NAMA	NAMA BANK/ INSTITUSI	LOKASI HARTA	TAHUN PEROLEHAN	SALDO	KETERANGAN (HARTA PPS/HARTA INVESTASI PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0101	Uang tunai/Bank Note	-	Tuan A	-	Indonesia	2024	300.000.000	
						7	8	9
JUMLAH TABEL 1						1	300.000.000	

TAMBAH HAPUS Data ke- 1

Rows 1 To 1 Of 1

[7] Diisi tahun perolehan kas dan setara kas
[8] Diisi dengan nilai nominal saldo
[9] Diisi jika kas dan setara kas terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

-
Harta PPS
Harta Investasi PPS

Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak

4. HARTA BERGERAK

KODE	DESKRIPSI	NOMOR POLISI/ REGISTRASI	KEPEMILIKAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (HARTA PPS/HARTA INVESTASI PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0403	TIPE : Mobil Penumpang (11) MEREK/MODEL : TOYOTA 86 (12)	(13) B 1234 OKE	☒ ATAS NAMA SENDIRI ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP 3171070708530003 NAMA NAMA3171070708530003	2025	200.000.000	200.000.000	
JUMLAH TABEL 4				4	200.000.000	200.000.000	

Sepeda
Sepeda Motor
Mobil Penumpang
Bus
Kendaraan Angkutan
Kendaraan Tujuan Kh
Kereta
Pesawat Terbang
Kapal

(10) TAMBAH HAPUS Data ke- 1

Rows 1 To 1 Of 1

[10] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan harta pada akhir tahun
[11] Pilih tipe harta bergerak
[12] Diisi dengan merek/model harta bergerak
[13] Diisi dengan nomor polisi/registrasi harta bergerak

Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

*Seluruh data harta wajib diiisi
* Kolom "Keterangan" jika harta terkait PPS

A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak

4. HARTA BERGERAK

KODE	DESKRIPSI	NOMOR POLISI/ REGISTRASI	KEPEMILIKAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (HARTA PPS/HARTA INVESTASI PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0403	TIPE : Mobil Penumpang MEREK/MODEL : TOYOTA 86	B 1234 OKE	☒ ATAS NAMA SENDIRI (14) ☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN NIK/NPWP 3171070708530003 (15) NAMA NAMA3171070708530003	2025 (16)	200.000.000 (17)	200.000.000 (18)	- (19) Harta PPS Harta Investasi PPS
JUMLAH TABEL 4				4	200.000.000	200.000.000	

TAMBAH HAPUS Data ke- 1

Rows 1 To 1 Of 1

[14] Pilih atas nama kepemilikan harta
[15] Diisi dengan NIK/NPWP serta nama Pemilik harta
[16] Diisi dengan tahun perolehan harta bergerak
[17] Diisi dengan harga perolehan harta bergerak
[18] Diisi dengan nilai harta pada akhir tahun pajak
[19] Diisi jika kas dan setara kas terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak

7. IKTISAR HARTA

DESKRIPSI		HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI
(1)		(2)	(3)
JUMLAH TABEL 7	7	500.000.000	500.000.000

Iktisar Harta menampilkan rekapitulasi keseluruhan dari harta yang sudah diisikan pada Bagian A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak **tabel 1** sampai dengan **tabel 6**



Jumlah Harta **Tabel 7 Kolom (2)** akan dipindahkan Ke **Induk Bagian I Angka 14 Huruf a.**

B. Utang Pada Akhir Tahun Pajak

B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

KODE	DESKRIPSI	KREDITUR		NEGARA KREDITUR	TAHUN PINJAMAN	SALDO	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		NIK/NPWP					
		NAMA					
JUMLAH TABEL 8					8		

20 TAMBAH HAPUS Data ke- 1

Rows 1 To 1 Of 1

[20] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan utang pada akhir tahun

*Seluruh data Utang wajib diiisi
* Isi Kolom "Keterangan" jika Utang terkait PPS

Utang pada tahun pajak sebelumnya harus dilakukan perubahan data sesuai dengan sisa utang pada akhir tahun pajak yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga)

B. Utang Pada Akhir Tahun Pajak

B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

KODE	DESKRIPSI	KREDITUR		NEGARA KREDITUR	TAHUN PINJAMAN	SALDO	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
101	Utang Bank / Lembaga Keu	NIK/NPWP	0000000000000000	Indonesia	2025	200.000.000	
		NAMA	MANDIRI				
JUMLAH TABEL 8					8	200.000.000	

20 TAMBAH HAPUS Data ke- 1

Rows 1 To 1 Of 1

[20] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan utang pada akhir tahun

*Seluruh data Utang wajib diiisi
* Isi Kolom "Keterangan" jika Utang terkait PPS

Utang pada tahun pajak sebelumnya harus dilakukan perubahan data sesuai dengan sisa utang pada akhir tahun pajak yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga)

C. Daftar Anggota Keluarga

C. DAFTAR KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

NAMA	NIK	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IBU TIGA ANAK	xxxxxxxxxxxxxxxx	30-11-1989	ISTRI	PNS
ANAK 1	xxxxxxxxxxxxxxxx	30-11-2013	ANAK	TIDAK BEKERJA
ANAK 2	xxxxxxxxxxxxxxxx	30-11-2016	ANAK	TIDAK BEKERJA
ANAK 3	xxxxxxxxxxxxxxxx	30-11-2019	ANAK	TIDAK BEKERJA

- Daftar Anggota Keluarga wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP
- Daftar Anggota Keluarga akan terisi otomatis berdasarkan data Unit Pajak Keluarga
- **Dalam kasus Tuan A, PTKP K/3**
- Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, Wajib Pajak dapat melakukan **perubahan data**

Menu Perubahan Data

Portal Saya>>Profil Saya>>Informasi Umum>>Edit>>Unit Pajak Keluarga

D. Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan

D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

NO	NAMA PEMBERI KERJA	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT. MUDAH	2345678901234567	533.500.000	6.000.000	527.500.000
				JUMLAH TABEL D	D	527.500.000

PINDAHKAN JUMLAH TABEL D KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF a.

TAMBAH HAPUS 21 Data ke- 1

Rows 1 To 1 Of 1

- Tabel Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan akan terisi otomatis berdasarkan data penghasilan di BPA1 dari Pemberi Kerja Tuan A dan Istri Tuan A
- Wajib Pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data penghasilan dari pekerjaan lain apabila diperlukan
- **Dalam kasus:**
  - **Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja dengan Ph. Bruto Rp.533.500.000 dan Ph. Neto Rp.527.500.000**
  - **Istri Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto sebesar Rp140.000.000 dan Ph. Neto Rp.135.200.000 yang harus dihapus dan dipindahkan ke Lampiran 2 bagian A (Istri Gabung Suami)** dengan klik tombol **Hapus** [21]
- Nilai Ph. Neto 527.500.000 akan dipindahkan ke Induk SPT Bagian B Angka 1 Huruf a.

E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PPh

NO	PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh		BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK	PENGHASILAN BRUTO	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
1	NIK/NPWP	2345678901234567	NOMOR	1	PPh Pasal 21	533.500.000	82.875.000
	NAMA	PT. MUDAH	TANGGAL	30-01-2026			

JUMLAH KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	16	82.875.000
KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI (DIISI DARI LAMPIRAN 2 JUMLAH TABEL C.10)	17	0
JUMLAH TABEL E (16) + (17)	E	82.875.000

PINDAHKAN JUMLAH TABEL E KE INDUK BAGIAN D ANGKA 10 HURUF a.

TAMBAH HAPUS 22 Data ke- 1

Rows 1 To 1 Of 1

- Tabel Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh akan terisi otomatis berdasarkan data pajak dipotong di BPA1 dari Pemberi Kerja
- Apabila memiliki Bukti Pemotongan/Pemungutan Lain, Wajib Pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data.
- **Dalam kasus:**
  - **Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja sebesar Rp87.375.000**
  - **Istri Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja sebesar Rp6.180.000 yang harus dihapus dan dipindahkan ke Lampiran 2 bagian A (Istri Gabung Suami)** dengan klik tombol **Hapus** [22]
- Jumlah Kredit Pajak Pajak Dalam Negeri Rp82.875.000 akan dipindahkan ke Induk SPT Bagian D Angka 10 Huruf a.

LAMPIRAN-2 Bagian A

A. Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	KODE	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK	PPh TERUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIK/NPWP : NAMA :				
JUMLAH TABEL A	A				

PINDAHKAN JUMLAH TABEL A KOLOM (5) KE BAGIAN INDUK BAGIAN I ANGKA 14 HURUF c.

23 TAMBAH HAPUS Data ke- 1

- Dalam Kasus Istri gabung suami (Tuan A) maka data penghasilan istri pada Lampiran 1 huruf D dan data bukti pemotongan pada Lampiran 1 huruf E (DPP Rp140.000.000 dan PPh Terutang Rp6.180.000 dipindahkan ke lampiran 2 huruf A ini
- Penambahan data diakukan dengan klik tombol **Tambah** [23]
- Pastikan jenis penghasilan pada kolom 4 yang dipilih adalah "**Penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh Kepala Keluarga**" sehingga kode pada kolom 3 akan terisi "**28-499-99"**
- Jumlah Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat Final Rp140.000.000 akan dipindahkan ke Induk SPT Bagian I Angka 14 Huruf c.

A. Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	KODE	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK	PPh TERUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIK/NPWP : 3456789012345678 NAMA : PT. ANDAL	28-499-99	Penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang h	140.000.000	6.180.000
JUMLAH TABEL A	A			**140.000.000**	**6.180.000**

PINDAHKAN JUMLAH TABEL A KOLOM (5) KE BAGIAN INDUK BAGIAN I ANGKA 14 HURUF c.

23 TAMBAH HAPUS Data ke- 1

- Dalam Kasus Istri gabung suami (Tuan A) maka data penghasilan istri pada Lampiran 1 huruf D dan data bukti pemotongan pada Lampiran 1 huruf E (DPP Rp140.000.000 dan PPh Terutang Rp6.180.000 dipindahkan ke lampiran 2 huruf A ini
- Penambahan data diakukan dengan klik tombol **Tambah** [23]
- Pastikan jenis penghasilan pada kolom 4 yang dipilih adalah "**Penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh Kepala Keluarga**" sehingga kode pada kolom 3 akan terisi "**28-499-99"**
- Jumlah Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat Final Rp140.000.000 akan dipindahkan ke Induk SPT Bagian I Angka 14 Huruf c.

LAMPIRAN-3B Bagian A

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WP OP YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

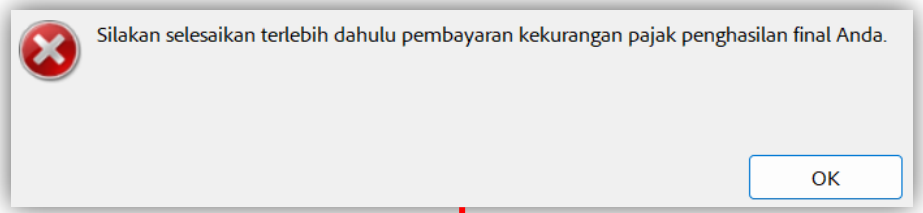
A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIP PAJAK ORANG PROBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN

NO	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	333333333333333333333 - CABA 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Rows 3 To 3 Of 3		PREV		
a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK							500.000.000							500.000.000
d. PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG **(0.5% x d)**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f. JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT PIHAK LAIN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h. SELISIH **(e-f-g)**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i. SELISIH KARENA PEMBETULAN														0
j. SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN **(h-i)**														0

[23] Diisi dengan nominal peredaran bruto di tiap masa pada tahun pajak dilaporkan (sesuai contoh kasus: @Rp100.000.000 dengan Total Rp1.200.000.000)

[24] Diisi dengan PPh Final yang telah disetor sendiri (sesuai contoh kasus: @Rp300.000 di masa Juni s/d Desember dengan Total Rp2.100.000)
**telah melewati threshold Rp500.000.000 bagi WP Orang Pribadi sesuai ketentuan perpajakan yang mengatur*

[25] Diisi dengan PPh Final yang telah dipotong dan disetor oleh pihak lain (sesuai contoh kasus: @Rp200.000 di masa Juni s/d Desember dengan total Rp1.400.000



"notifikasi timbul untuk mengingatkan bahwa data nominal yang diinput agar diselesaikan penyetorannya terlebih dahulu."

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WP OP YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

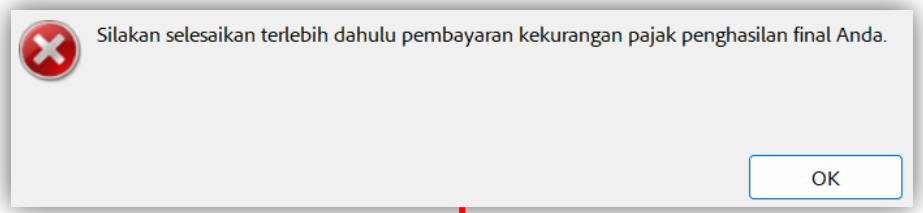
A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIP PAJAK ORANG PROBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN

NO	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	333333333333333333333 - CAB	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.200.000.000
									Rows 3	To 3	Of 3	PREV		
a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.200.000.000
b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO		100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	600.000.000	700.000.000	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	
c. PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK		**500.000.000**												**500.000.000**
d. PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK		0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	700.000.000
e. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG **(0.5% x d)**		0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000
f. JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT PIHAK LAIN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h. SELISIH **(e-f-g)**		0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000
i. SELISIH KARENA PEMBETULAN														0
j. SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN **(h-i)**														0

[23] Diisi dengan nominal peredaran bruto di tiap masa pada tahun pajak dilaporkan (sesuai contoh kasus: @Rp100.000.000 dengan Total Rp1.200.000.000)

[24] Diisi dengan PPh Final yang telah disetor sendiri (sesuai contoh kasus: @Rp300.000 di masa Juni s/d Desember dengan Total Rp2.100.000)
**telah melewati threshold Rp500.000.000 bagi WP Orang Pribadi sesuai ketentuan perpajakan yang mengatur*

[25] Diisi dengan PPh Final yang telah dipotong dan disetor oleh pihak lain (sesuai contoh kasus: @Rp200.000 di masa Juni s/d Desember dengan total Rp1.400.000



"notifikasi timbul untuk mengingatkan bahwa data nominal yang diinput agar diselesaikan penyetorannya terlebih dahulu."

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WP OP YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIP PAJAK ORANG PROBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN

NO	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	333333333333333333333 - CABA	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.200.000.000
									Rows 3	To 3	Of 3	PREV		
a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.200.000.000
b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO		100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	600.000.000	700.000.000	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	
c. PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK		500.000.000												500.000.000
d. PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK		0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	700.000.000
e. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG (0.5% x d)		0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000
f. JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI		0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.100.000
g. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT PIHAK LAIN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h. SELISIH (e-f-g)		0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.400.000
i. SELISIH KARENA PEMBETULAN														0
j. SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN (h-i)														0

23

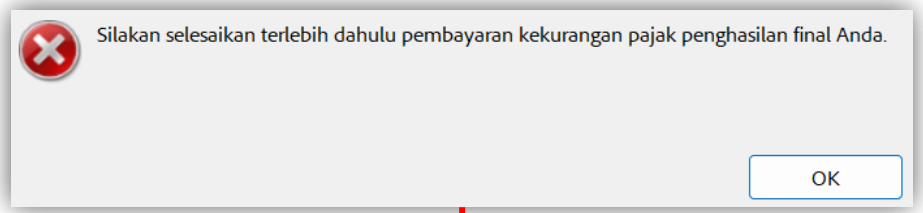
24

25

[23] Diisi dengan nominal peredaran bruto di tiap masa pada tahun pajak dilaporkan (sesuai contoh kasus: @Rp100.000.000 dengan Total Rp1.200.000.000)

[24] Diisi dengan PPh Final yang telah disetor sendiri (sesuai contoh kasus: @Rp300.000 di masa Juni s/d Desember dengan Total Rp2.100.000)
**telah melewati threshold Rp500.000.000 bagi WP Orang Pribadi sesuai ketentuan perpajakan yang mengatur*

[25] Diisi dengan PPh Final yang telah dipotong dan disetor oleh pihak lain (sesuai contoh kasus: @Rp200.000 di masa Juni s/d Desember dengan total Rp1.400.000



"notifikasi timbul untuk mengingatkan bahwa data nominal yang diinput agar diselesaikan penyetorannya terlebih dahulu."

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WP OP YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIP PAJAK ORANG PROBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN

NO	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	3333333333333333333 - CAB	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.200.000.000
									Rows 3	To 3	Of 3	PREV		
a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.200.000.000
b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO		100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	600.000.000	700.000.000	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	
c. PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK		**500.000.000**												**500.000.000**
d. PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK		0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	700.000.000
e. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG **(0.5% x d)**		0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000
f. JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI		0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.100.000
g. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT PIHAK LAIN		0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.400.000
h. SELISIH **(e-f-g)**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i. SELISIH KARENA PEMBETULAN														0
j. SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN **(h-i)**														0

23

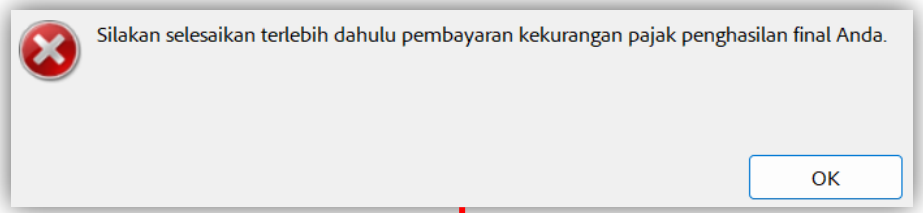
24

25

[23] Diisi dengan nominal peredaran bruto di tiap masa pada tahun pajak dilaporkan (sesuai contoh kasus: @Rp100.000.000 dengan Total Rp1.200.000.000)

[24] Diisi dengan PPh Final yang telah disetor sendiri (sesuai contoh kasus: @Rp300.000 di masa Juni s/d Desember dengan Total Rp2.100.000)
**telah melewati threshold Rp500.000.000 bagi WP Orang Pribadi sesuai ketentuan perpajakan yang mengatur*

[25] Diisi dengan PPh Final yang telah dipotong dan disetor oleh pihak lain (sesuai contoh kasus: @Rp200.000 di masa Juni s/d Desember dengan total Rp1.400.000



"notifikasi timbul untuk mengingatkan bahwa data nominal yang diinput agar diselesaikan penyetorannya terlebih dahulu."

PRAKTIK

TAHAP 5: PENGECEKAN NILAI PADA INDUK SPT

Pengecekan Nilai Pada Induk



C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

2	PENGHASILAN NETO SETAHUN	(1a + 1b + 1c + 1d)	527.500.000
3	APAKAH TERDAPAT PENGURANGAN PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?		
	☑ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)		
	☐ Ya. (Isi **Lampiran 5 Bagian A** dan/atau **Bagian B**, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		
4	PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO	(2 - 3)	527.500.000
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	K/3	72.000.000
6	PENGHASILAN KENA PAJAK	(4 - 5)	455.500.000
7	PPh TERUTANG		82.875.000
8	APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG?		
	☑ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)		
	☐ Ya. (Isi **Lampiran 5 Bagian C**, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		
9	PPh TERUTANG SETELAH PENGURANGAN PPh TERUTANG	(7 - 8)	82.875.000

D. KREDIT PAJAK

10 a	APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?		82.875.000
	☐ Tidak. (lanjut ke pertanyaan selanjutnya)		
	☑ Ya. (Isi **Lampiran 1 Bagian E**, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	Lampiran 1 Bagian E	
b	ANGSURAN PPh PASAL 25		0
c	STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)		0
d	APAKAH ANDA MENERIMA PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PPh LUAR NEGERI YANG TELAH DIKREDITKAN?		
	☑ Tidak. (lanjut ke pertanyaan selanjutnya)		
	☐ Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri)		

© TIK 2026

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11 a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR	(9 - 10a - 10b - 10c + 10d)	0
b	APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK		
	☑ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)		
	☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		
c	PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR	(11a - 11b)	0

- Pastikan nilai pada bagian C.9 PPh terutang setelah pengurang PPh terutang = D.10a Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain
- Apabila **C.9 = D.10a** maka Nilai E.11a PPh kurang/lebih bayar akan 0 (Nihil)
- **Dalam kasus Tuan A, C.9 = D.10 = Rp82.875.000**
- **SPT Tahunan Orang Pribadi Tuan A Status Nihil, siap dilakukan pelaporan**

PRAKTIK

TAHAP 6: PENYAMPAIAN SPT

Bagian Induk Pernyataan



K. PERNYATAAN

1 ☑ DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

TANGGAL BULAN TAHUN

PENANDA TANGAN ☑ WAJIB PAJAK ■ WAKIL/KUASA

2 03-02-2026

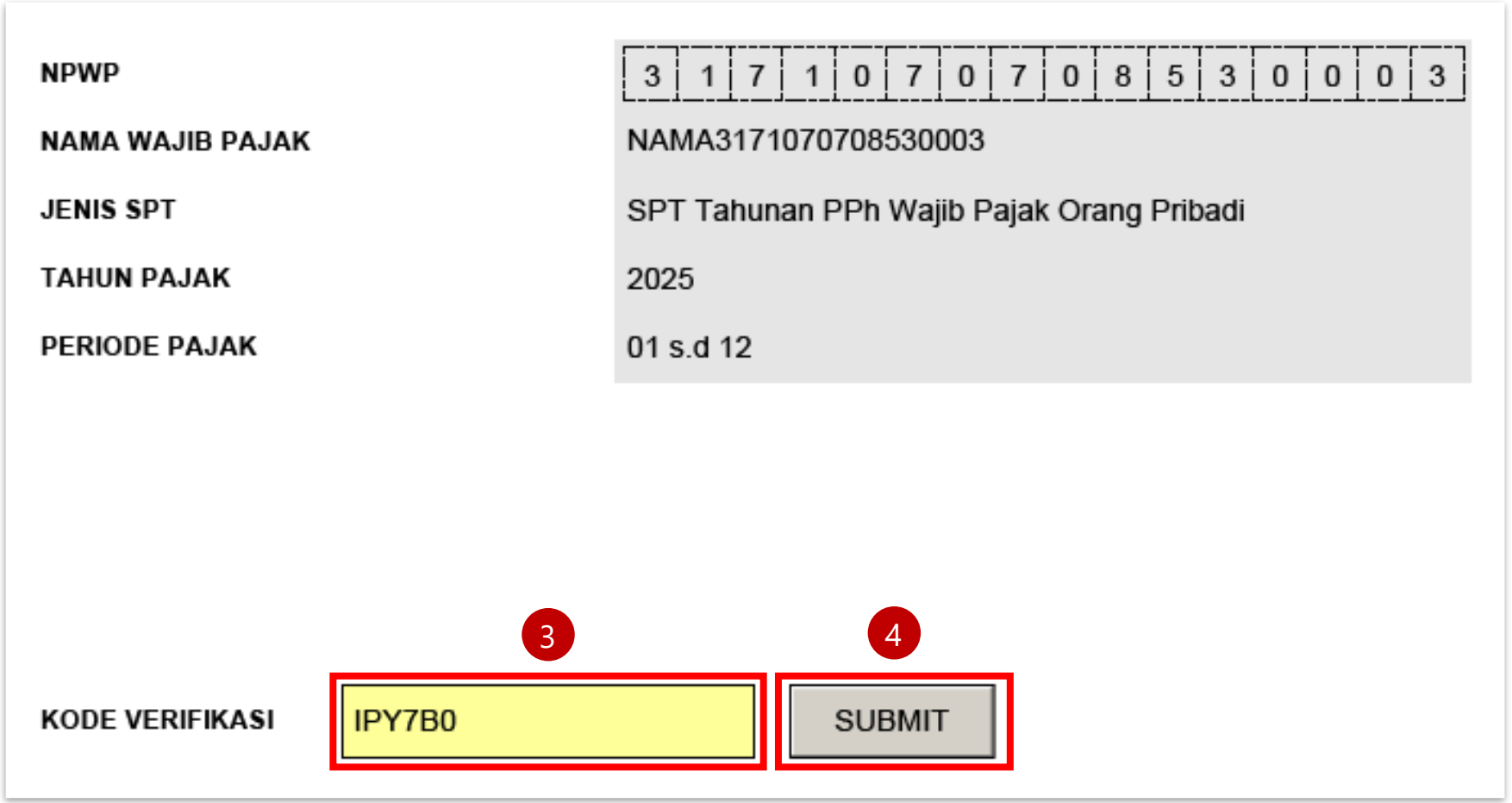
NIK/NPWP	3 1 7 1 0 7 0 7 0 8 5 3 0 0 0 3
NAMA LENGKAP	NAMA3171070708530003

TANDA TANGAN

© TIK 2026

[1] Centang pernyataan kebenaran pengisian data
[2] diisi dengan tanggal penandatanganan SPT

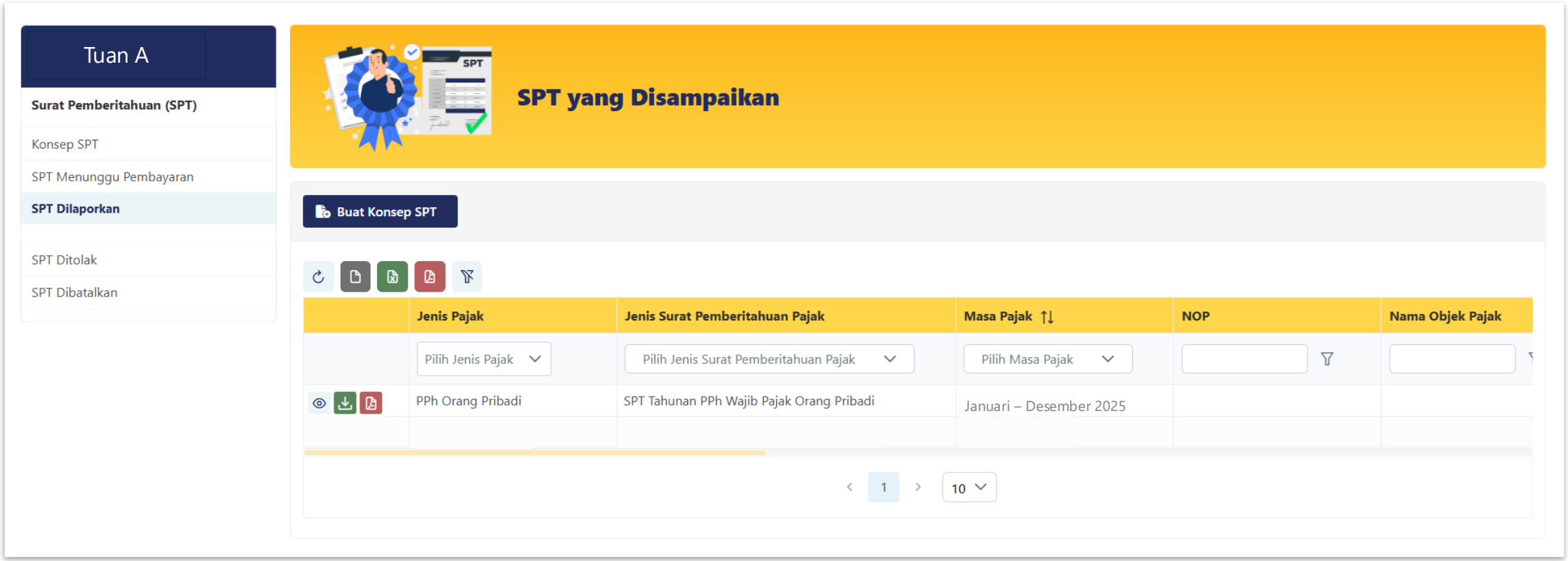
Tahap Pengiriman SPT Tahunan Orang Pribadi



[3] Diisi dengan kode verifikasi yang dikirim ke email terdaftar
*kode verifikasi dikirim Ketika konsep SPT berhasil dibuat

[4] Klik **Submit**

SPT Dilaporkan



- SPT Tahunan PPh OP Tuan A yang telah dilaporkan dapat diakses melalui aplikasi Coretax Form
  Pilihan untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan
- Pilihan untuk melakukan unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)
- Pilihan untuk melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan

Contoh tampilan BPE



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN
JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4 GKN I LT. 1, MAKASSAR, 90232
TELEPON (0411) 441680; FAKSIMILE (0411) 441260; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor: BPE-00048/KPP.1502/2026
Tanggal: 20 Januari 2026

NPWP	: 1234567890123456	Tanggal Terima SPT	: 20 Januari 2026
Nama Wajib Pajak	: TUAN A	Tahun Pajak	: 2025
Jenis SPT	: SPT Tahunan Orang Pribadi	Masa Pajak	: Januari-Desember 2025
Status SPT	: Normal	Saluran	: Portal Wajib Pajak

Contoh tampilan Bukti Penerimaan Elektronik atas penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax

Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube **@DitjenPajakRI**

Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/**lapor-tahunan**

Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja

Terima Kasih

Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami

@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id